

KARAKTERISTIK PERUSAHAAN SEBAGAI ANTESEDEN PENGUNGKAPAN WAJIB INFORMASI AKUNTANSI

Andian Ari Istiningrum

Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM Akamigas), Indonesia

Email: aa_istiningrum@yahoo.com

Abstrak: Karakteristik Perusahaan Sebagai Anteseden Pengungkapan Wajib Informasi Akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan yang meliputi ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan perusahaan terhadap pengungkapan wajib. Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas. Sampel yang digunakan yaitu 47 perusahaan manufaktur dari 129 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Data dianalisis dengan regresi linear berganda. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, linearitas, dan multikolinearitas dilakukan terlebih dahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib.

Kata Kunci: pengungkapan wajib, ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan perusahaan

Abstract: Company Characteristics as Antecedent of Mandatory Disclosure of Accounting Information. The objective of this research was to get knowledge about the influence of company characteristics including company size, company age, profitability, leverage, and company growth toward mandatory disclosure. The research was research of causality. The sample used in this research was 47 manufacturing companies from 129 manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange in 2012. Purposive sampling was the technique used to select samples. Data was analyzed by using multiple linear regressions. Before multiple linear regressions were conducted, the normality, heteroscedasticity, linearity, and multicollinearity must be met. The results showed that company size, company age, profitability, leverage, and company growth had no effect to mandatory disclosure.

Keywords: mandatory disclosure, company size, company age, profitability, leverage, company growth

PENDAHULUAN

Pengungkapan wajib menjadi isu penting bagi perusahaan pada masa peralihan standar akuntansi. Standar akuntansi internasional yaitu *International Financial Reporting Standards* (IFRS) menghendaki perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keuangan.

Perusahaan wajib mengungkapkan informasi kepada investor dan pemakai laporan keuangan lainnya sehingga bisa meminimalisir asimetri informasi (Cooke, 1989). Investor menginginkan perusahaan untuk memberikan informasi selengkap mungkin sehingga informasi tersebut relevan

untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Pengungkapan wajib menentukan keefektifan fungsi pasar modal (Akhtaruddin, 2005). Semakin luas informasi yang disampaikan perusahaan kepada investor, semakin efektif pula pasar modal. Dari sisi perusahaan, pengungkapan wajib memungkinkan perusahaan untuk memasarkan saham, meningkatkan reputasi, dan meminimalisir biaya modal sehingga nilai perusahaan akan naik (Meek, dkk., 1995; Popova, dkk., 2013).

Walaupun pengungkapan wajib bermanfaat tidak hanya dari sisi investor tetapi juga perusahaan, perusahaan masih enggan untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada investor. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mensyaratkan agar perusahaan memiliki tingkat kepatuhan 100% dalam memberikan pengungkapan wajib yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Akan tetapi, sebagian besar perusahaan yang bergerak pada sektor industri manufaktur terbukti belum memenuhi kriteria tersebut (Prawinandi, dkk., 2012; Utami, dkk., 2012). Perusahaan pada sektor manufaktur seharusnya mematuhi kriteria Bapepam-LK karena perusahaan tersebut memiliki basis investasi yang luas. Perusahaan manufaktur memiliki proporsi aset tetap yang besar sehingga mereka sangat mengandalkan dana dari investor (Utami, dkk., 2012).

Pengungkapan wajib adalah keseluruhan aspek dan informasi yang harus dipublikasikan oleh perusahaan sebagai akibat dari diberlakukannya peraturan hukum, peraturan pasar modal, ataupun

peraturan standar akuntansi (Adina & Ion, 2008). Pengungkapan wajib juga didefinisikan sebagai informasi yang diharuskan oleh badan regulasi untuk disampaikan oleh perusahaan (Popova, dkk., 2013). Pengungkapan wajib merupakan sarana perusahaan untuk memberikan jaminan kepada investor bahwa sumber daya telah dialokasikan dengan efektif (Adina & Ion, 2008). Tingkat terjadinya asimetri informasi antara perusahaan dan investor akan berkurang jika perusahaan mengungkapkan informasi yang dipersyaratkan dalam standar akuntansi keuangan (Adina & Ion, 2008; Jensen & Meckling, 1976).

Pengungkapan wajib muncul sebagai konsekuensi dari munculnya peraturan-peraturan dari badan regulasi di suatu negara (Akhtaruddin, 2005; Healy & Palepu, 2001). Manajemen pada dasarnya memiliki keinginan untuk menyembunyikan informasi dari investor (Darrough, 1993). Hal ini sejalan dengan Teori Keagenan yang menyatakan bahwa manajemen akan berusaha memaksimalkan laba untuk kepentingan mereka sendiri. Manajemen sebagai pihak yang melaksanakan operasi harian perusahaan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengejar keuntungan pribadi, seperti bonus dan insentif, yang tinggi di mana semuanya ini akan merugikan investor (Alanezi & Albuloushi, 2010; Healy & Palepu, 2001). Oleh karena itu, badan regulasi memaksa perusahaan untuk menyampaikan informasi pada tingkat minimal yang disyaratkan oleh mereka dengan tujuan untuk memperkecil kesenjangan informasi antara manajemen dan investor (Healy, dkk., 2001).

Laporan keuangan yang telah diaudit merupakan salah satu sumber utama yang dapat digunakan perusahaan untuk mengungkapkan informasi kepada investor (Chau & Gray, 2010; Marston & Shrivess, 1991). Pengungkapan dilakukan pada catatan kaki laporan keuangan. Pengungkapan wajib memungkinkan laporan keuangan memiliki kualitas tinggi yang akan mempermudah investor untuk memahami dan membandingkan informasi yang ada di dalamnya (Choi, 2005).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan wajib. Beberapa penelitian relevan membuktikan bahwa karakteristik perusahaan mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam melakukan pengungkapan wajib. Beberapa karakteristik perusahaan yang mempengaruhi luas pengungkapan wajib perusahaan antar lain: (1) Ukuran perusahaan (Akhtaruddin, 2005; Ali, dkk., 2004; Benjamin, dkk., 1990; Cooke, 1989; Wallace, 1987; Wallace & Naser, 1995), (2) Umur perusahaan (Alanezi & Albuloushi, 2010; Owusu-Ansah, 1998; Popova, dkk., 2013), (3) Profitabilitas (Ali, dkk., 2004; Latridis, 2008; Nasser, 1998; Owusu-Ansah, 1998), (4) *Leverage* (Malone, dkk., 1993; Latridis, 2008; Owusu-Ansah & Yeo, 2005), dan (5) Pertumbuhan Perusahaan.

Ukuran perusahaan bisa dilihat dari logaritma total aset yang dimiliki perusahaan (Alanezi & Albuloushi, 2010; Bova & Pereira, 2012). Perusahaan besar pada laporan keuangannya cenderung untuk menyampaikan lebih banyak informasi kepada investor. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan

positif antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan wajib yang dilakukan perusahaan (Akhtaruddin, 2005; Barako, dkk., 2006; Cooke, 1989; Glaum & Street, 2003). Ahmet dan Nicholls (1994) berpendapat bahwa perusahaan besar memiliki lebih banyak tenaga kerja yang berlatar belakang akuntansi dan keuangan sehingga perusahaan besar bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi termasuk di dalamnya mematuhi pengungkapan wajib yang dipersyaratkan dalam standar akuntansi. Sumber daya yang beragam juga memudahkan perusahaan besar untuk mengelola biaya, bersaing dengan kompetitor, dan mendapatkan modal sehingga semua kelebihan ini cenderung akan diungkapkan oleh perusahaan besar dalam laporan keuangannya (Ahmed & Nicholls, 1994; Naser, 1998). Popova dkk. (2013) menambahkan bahwa informasi yang berkualitas akan menghasilkan biaya modal yang rendah bagi perusahaan besar untuk mendapatkan modal dari investor. Di sisi lain, analisis keuangan seringkali meminta perusahaan besar untuk menyajikan informasi sehingga hal ini akan memudahkan investor dalam membuat keputusan (McKinnon & Dalimunte, 1993). Kepatuhan perusahaan terhadap pengungkapan wajib yang diminta dalam standar akuntansi akan memudahkan perusahaan besar untuk menarik investor (Wallace dkk., 1994) dan mendapatkan modal dari berbagai sumber (Alanezi & Albuloushi, 2010). Jika dilihat dari perbandingan antara biaya dan manfaat menyediakan informasi secara detail, perusahaan besar berada di posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan

perusahaan kecil (Arcay & Vazquez, 2005). Biaya untuk menyediakan informasi mendetail dan risiko terciptanya *competitive disadvantages* melalui pengungkapan perusahaan akan lebih rendah bagi perusahaan besar jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh perusahaan besar. Dengan adanya pengungkapan wajib, perusahaan besar sekaligus juga memanfaatkan informasi tersebut untuk mencukupi kebutuhan internal mereka dalam melakukan investasi pada aset tetap dan proses inovasi (Ball & Foster's, 1982). Selain itu, manfaat yang diterima dari perusahaan besar yang melakukan pengungkapan penuh akan menjadi halangan bagi perusahaan kecil (Depoers, 2000) karena perusahaan besar lebih memiliki posisi menguntungkan di pasar modal (Singhvi & Desai, 1971). Atas dasar hal tersebut, maka hipotesis pertama (H1) yang diajukan adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib.

Umur perusahaan merupakan faktor yang sering diperhatikan oleh manajemen perusahaan dalam menentukan seberapa luas pengungkapan wajib akan dilakukan (Popova, dkk., 2013). Umur perusahaan bisa dilihat dari lamanya perusahaan terdaftar di pasar modal (Alanezi & Albuloushi, 2010). Perusahaan yang telah lama berdiri memiliki lebih banyak pengalaman dalam menyampaikan informasi melalui laporan keuangan karena perusahaan tersebut sudah memahami informasi apa yang dibutuhkan oleh investor. Oleh karena itu, semakin lama perusahaan berdiri, semakin berpengalaman perusahaan dalam memenuhi kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan, dan semakin rendah biaya yang diperlukan untuk

memproses dan menghasilkan informasi (Owusu-Ansah, 1998). Menurut Popova dkk. (2013) perusahaan dewasa memiliki dua motivasi untuk mengungkapkan informasi selengkap mungkin kepada investor, yaitu: (1) perusahaan dewasa memerlukan investor untuk terus menanamkan modal pada perusahaan, dan (2) perusahaan dewasa harus menjaga reputasi dan kredibilitas mereka. Sebagai tambahan, Owusu-Ansah (1998) menjelaskan bahwa perusahaan muda seringkali menemui kendala dalam usahanya memberikan informasi kepada investor. Kendala tersebut antara lain: (1) perusahaan muda kurang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mereka cenderung membatasi pemberian informasi, (2) biaya untuk mendapatkan, mengolah, dan menyampaikan informasi menjadi hambatan bagi perusahaan muda untuk menyampaikan informasi secara lengkap, (3) perusahaan muda masih belum memiliki *track record* sehingga menyulitkan mereka untuk bergantung pada opini publik. Atas dasar hal tersebut, maka hipotesis kedua (H2) yang diajukan adalah umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib.

Profitabilitas merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang penting karena profitabilitas menunjukkan karakteristik utama dalam mengukur kesuksesan kinerja manajemen (Alanezi & Albuloushi, 2010). Profitabilitas bisa diukur dengan menggunakan *return on equity* (ROE) yaitu dengan membagi laba setelah pajak dengan total ekuitas (Bova & Pereira, 2012). Tingkat profitabilitas yang tinggi akan memotivasi manajemen untuk mengungkapkan lebih banyak informasi

dengan harapan hal ini akan mempertinggi bonus yang akan mereka terima (Inchausti, 1997). Selain itu, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi memiliki insentif untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka memiliki kinerja yang baik sehingga memudahkan mereka untuk mendapatkan modal dari investor. (Foster dalam (Rusiti & Kurniawan, 2013)). Oleh karena itu, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin luas pula pengungkapan wajib yang diberikan perusahaan. Atas dasar hal tersebut, hipotesis ketiga (H3) yang diajukan adalah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib.

Leverage menunjukkan seberapa jauh aset perusahaan didanai dengan menggunakan kewajiban (Popova, dkk., 2013). *Leverage* juga menunjukkan proporsi antara kewajiban dan ekuitas yang digunakan perusahaan dalam rangka mendapatkan aset (Alanezi & Albuloushi, 2010). *Leverage* memiliki hubungan positif dengan seberapa luas perusahaan harus mengungkapkan informasi dalam laporan keuangannya (Karim & Ahmed, 2005; Omar & Simon 2011). Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi akan menghadapi risiko gagal dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, perusahaan tersebut cenderung akan menyampaikan informasi yang lebih lengkap dalam laporan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi biaya keagenan karena manajemen bisa memberikan informasi untuk meyakinkan kreditor jangka panjang bahwa perusahaan mampu untuk melunasi kewajibannya (Ahmed & Courtis, 1999; Omar & Simon, 2011; Wallace, dkk., 1994). Oleh karena itu, hipotesis keempat (H4) yang diajukan adalah

leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib.

Pertumbuhan perusahaan diukur dengan membagi nilai buku saham dengan harga pasar saham (Bova & Pereira, 2012). Perusahaan yang pertumbuhannya baik akan berusaha untuk meningkatkan transparansi kinerja mereka dengan mematuhi Pengungkapan Wajib yang disyaratkan oleh badan regulasi. Hal ini dilakukan karena semakin transparan perusahaan dalam mengungkapkan informasi maka semakin rendah biaya pendanaan eksternal (Easley & O'Hara, 2004). Oleh karena itu, hipotesis kelima (H5) yang diajukan adalah pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah pengaruh antara ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan perusahaan terhadap pengungkapan wajib.

Penelitian ini menggunakan *dependent variable* yaitu pengungkapan wajib dan *independent variable* yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan perusahaan. Definisi operasional masing-masing variabel disajikan pada Tabel 1.

Pengungkapan wajib pada penelitian ini dilakukan pada PSAK 30 mengenai Sewa dan PSAK 16 mengenai Aset Tetap. PSAK 30 menjadi fokus penelitian ini karena penelitian sebelumnya memberikan hasil bahwa pengungkapan wajib paling rendah yaitu pengungkapan wajib pada PSAK 30 dengan

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Pengungkapan Wajib	Informasi yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk disampaikan perusahaan kepada investor.	Pengukuran menggunakan IFRS Presentation and Disclosure Checklist yang diterbitkan oleh Deloitte (Al Mutawaa & Hewaidy, 2010; Prawinandi, dkk., 2012; Utami, dkk., 2012). Pendekatan <i>unweighted approach</i> dengan indeks relatif digunakan untuk mengukur skor butir yang diungkapkan (Akhtaruddin, 2005; Cooke, 1989; Inchausti, 1997; Owusu-Ansah, 1998; Wallace & Naser, 1995). Formula yang digunakan sebagai berikut: $TI = \frac{TD}{M} = \frac{\sum_1^m d_i}{\sum_1^n d_i}$ dimana: TI = total indeks pengungkapan TD = total skor pengungkapan M = skor pengungkapan maksimum setiap perusahaan d = pengungkapan butir <i>i</i> m = jumlah aktual pengungkapan butir yang relevan pada setiap perusahaan n = jumlah butir yang dapat diungkapkan perusahaan (Aljafiri, 2008)
Ukuran Perusahaan	Total aset yang dimiliki perusahaan	Logaritma total aset (Alanezi & Albuloushi, 2010).
Umur Perusahaan	Lamanya waktu perusahaan beroperasi sejak perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).	Berapa tahun perusahaan terdaftar di BEI (Alanezi & Albuloushi, 2010; Haniffa & Cooke, 2002).
Profitabilitas	Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.	<i>Return on Equity</i> (ROE) $ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$ (Arifin, 2004; Bova & Pereira, 2012)
Leverage	Proporsi aset perusahaan didanai dengan menggunakan kewajiban dan ekuitas.	<i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) $DER = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$ (Arifin, 2004)
Pertumbuhan Perusahaan	Kemampuan perusahaan untuk mengembangkan diri.	<i>Book to Price per Share Ration</i> (BP) $BP = \frac{\text{nilai buku saham}}{\text{harga pasar saham}}$ (Bova & Pereira, 2012)

tingkat kepatuhan sebesar 25% (Utami, dkk., 2012). Selanjutnya, pemilihan PSAK 16 didasarkan pada proporsi aset tetap yang sangat signifikan pada perusahaan

manufaktur (Utami, dkk., 2012). Jumlah butir yang harus diungkapkan oleh setiap perusahaan disajikan pada Tabel 2. Laporan keuangan yang menjadi dasar penelitian

Tabel 2. Jumlah Butir pada PSAK 16 dan PSAK 30

PSAK	Judul	Jumlah Butir yang Diungkapkan
PSAK 16	Aset Tetap	28
PSAK 30	Sewa	21
	Jumlah	49

yaitu laporan keuangan tahun 2012 karena tahun 2012 adalah tahun pertama Indonesia mengimplementasikan IFRS secara penuh.

Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 sejumlah 129 perusahaan. Perusahaan manufaktur dijadikan populasi karena: (1) perusahaan manufaktur memiliki kecenderungan untuk menyampaikan lebih banyak pengungkapan, dan (2) perusahaan manufaktur memiliki basis investasi yang luas (Utami, dkk., 2012). Sampel dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahun 2012, (2) Perusahaan membagi dividen tahun 2012, dan (3) Perusahaan mempublikasikan data terkait dengan variabel penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, 47 perusahaan terpilih menjadi sampel penelitian.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dijawab dengan menggunakan uji t pada regresi linear berganda. Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut: $PW = \alpha + \beta_1 \text{Ukuran} + \beta_2 \text{Umur} + \beta_3 \text{Profit} + \beta_4 \text{Lev} + \beta_5 \text{Tumbuh} + \epsilon$. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi lebih

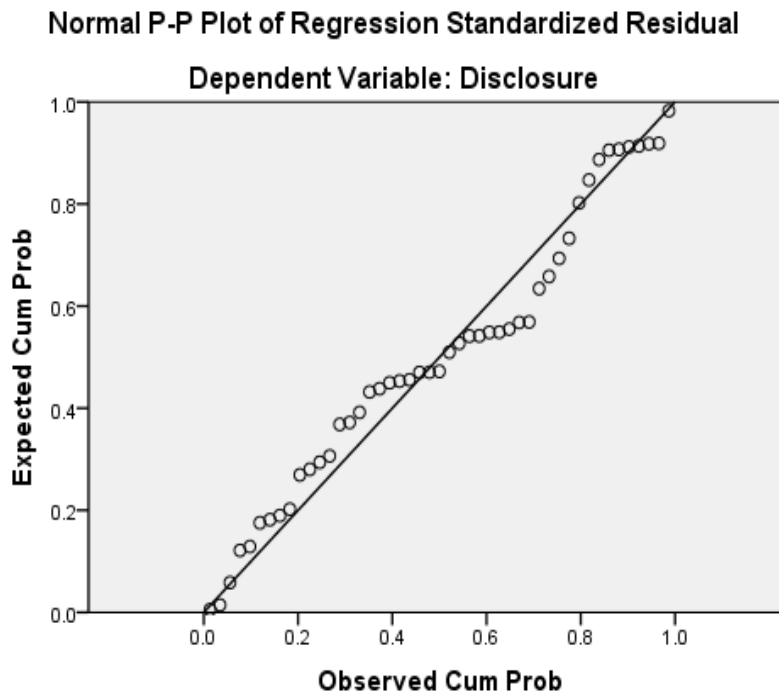
kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Sebelum regresi berganda dilakukan, uji prasyarat analisis harus dipenuhi. Uji prasyarat analisis pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji linearitas, dan uji multikolinearitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 menunjukkan statistik deskriptif masing-masing variabel. Dari hasil statistic deskriptif, perusahaan yang paling patuh dalam memberikan pengungkapan wajib kepada investor yaitu Indospring Tbk dengan tingkat kepatuhan sebesar 81%, sedangkan tingkat kepatuhan terendah yaitu sebesar 38%. Rata-rata tingkat pengungkapan wajib perusahaan manufaktur yaitu 63% yang berarti masih di bawah kriteria yang disyaratkan oleh Bapepam-LK. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa tingkat *leverage* rata-rata perusahaan manufaktur sebesar 6.768. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* perusahaan pada industri manufaktur sangat tinggi karena penggunaan utang yang jauh lebih besar daripada modal sendiri. Perusahaan yang masuk dalam sampel penelitian telah memiliki sejarah

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimal	Maksimal	Rata-Rata	Standar Deviasi
Pengungkapan Wajib	47	0,38	0,81	0,6326	0,09107
Ukuran Perusahaan	47	5,40	7,89	6,4174	0,63468
Umur Perusahaan	47	2,00	32,00	20,3617	7,57119
Profitabilitas	47	0,03	1,37	0,26688	0,3185
<i>Leverage</i>	47	0,05	153,95	6,7683	27,54822
Pertumbuhan Perusahaan	47	0,02	2,65	0,5951	0,58572



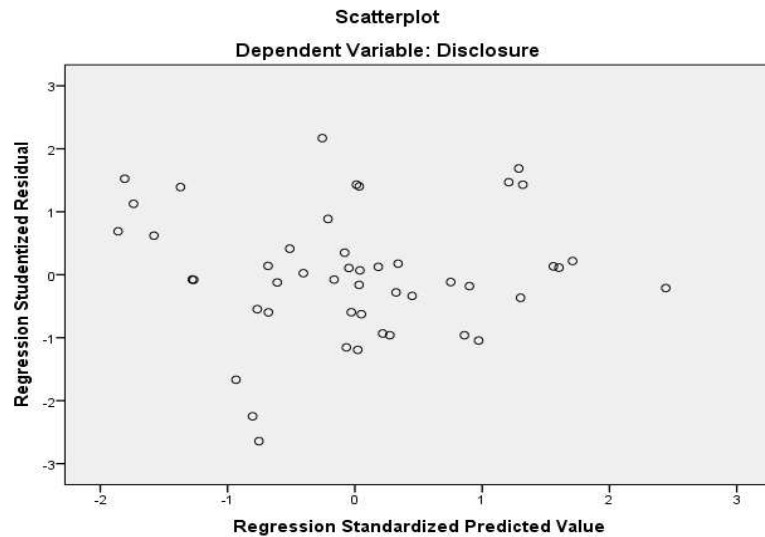
Gambar 1. Normal Probability Plot

panjang dalam pengelolaan perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata perusahaan telah berumur 20 tahun. Meskipun demikian, disparitas umur perusahaan cukup tinggi dengan simpangan lebih dari 7 tahun.

Uji prasyarat analisis pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik berupa histogram dan *normal probability plot*. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka modal regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2011). Gambar 1 menunjukkan histogram dan *normal probability plot*. Grafik histogram memberikan pola distribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Hal ini diperkuat dengan normal probability plot yang menunjukkan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan

mengikuti arah garis diagonal yang berarti data berdistribusi normal.

Uji prasyarat kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Dasar analisis yang digunakan yaitu: (1) jika ada pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, dan (2) jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-tik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Gambar 2 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot*. Dari grafik tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 2. Grafik *Scatterplot*

Uji prasyarat ketiga yaitu uji linearitas yang dilakukan dengan menggunakan Uji Lagrange Multiplier. Hasil tampilan output untuk uji *Lagrange Multiplier*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,159 dengan jumlah n observasi 47, maka besarnya nilai c^2 hitung = $47 \times 0,159 = 7,473$. Nilai ini dibandingkan dengan c^2 tabel dengan $df = 40$ dan tingkat signifikansi 0,05 didapat nilai c^2 tabel 55,8. Oleh karena nilai c^2 hitung lebih kecil dari c^2 tabel maka dapat disimpulkan bahwa model linear merupakan model yang tepat.

Uji prasyarat yang terakhir yaitu uji multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas. Multikolinearitas tidak terjadi jika nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai $VIF \leq 10$ (Ghozali, 2011). Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai

tolerance semua variabel $\geq 0,1$ dan $VIF \leq 10$ yang berarti tidak terjadi multikolinearitas.

Karena semua syarat sudah terpenuhi, uji hipotesis dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda dapat dilakukan. Tabel 5 menunjukkan hasil uji hipotesis yang menghasilkan persamaan regresi linear berganda yang dapat dibentuk yaitu:

$$PW = 0,648 - 0,011Ukuran + 0,004Umur - 0,013Profit + 0,001Lev - 0,033Tumbuh + \epsilon.$$

Nilai $R^2 = 0,159$ menunjukkan bahwa 15,9% variasi pengungkapan wajib dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel bebas ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan perusahaan, sedangkan sisanya dijelaskan variabel lain di luar model.

Tabel 5 menunjukkan bahwa H_1 ditolak karena nilai signifikansi $0,652 > 0,05$ yang

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Ukuran Perusahaan	0,732	1,366
Umur Perusahaan	0,732	1,367
Profitabilitas	0,560	1,787
Leverage	0,759	1,318
Pertumbuhan Perusahaan	0,647	1,545

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>	t	Signifikansi	Keterangan
Konstanta	0,648	3,721	0,001	
Ukuran Perusahaan	-0,011	-0,455	0,652	Hipotesis ditolak
Umur Perusahaan	0,004	1,785	0,082	Hipotesis ditolak
Profitabilitas	-0,013	-0,239	0,812	Hipotesis ditolak
<i>Leverage</i>	0,001	1,273	0,210	Hipotesis ditolak
Pertumbuhan Perusahaan	-0,033	-1,176	0,247	Hipotesis ditolak
R	= 0,398			
R ²	= 0,159			
α	= 0,05			

berarti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib yang disampaikan perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Alanezi & Albuloushi (2010), Glaum & Street (2003), Owusu-Ansah & Yeo (2005), Popova, dkk. (2013). Tabel 7 juga menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel umur perusahaan yaitu $0,082 > 0,05$ sehingga H_2 ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Alanezi & Albuloushi (2010), Glaum & Street (2003). Perusahaan besar dan perusahaan dewasa seringkali memiliki akuntan yang lebih banyak dan lebih kompeten dari perusahaan kecil dan perusahaan muda. Akan tetapi, pada tahun pertama pelaksanaan IFRS secara penuh, akuntan-akuntan baik pada perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan dewasa, maupun perusahaan muda masih beradaptasi untuk mempelajari dan mempraktekkan IFRS. IFRS yang bersifat *principle-based* menghendaki pengungkapan informasi yang lebih lengkap dan banyak dibandingkan dengan US-GAAP yang bersifat *ruled-based*. Perbedaan paradigma akuntansi tersebut menyebabkan akuntan di

perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan dewasa, dan perusahaan muda membutuhkan waktu untuk beradaptasi sehingga sangat dimungkinkan bahwa akuntan-akuntan tersebut belum sepenuhnya siap untuk menggunakan PSAK berbasis IFRS pada tahun pertama implementasi IFRS. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dan umur perusahaan di tahun pertama implementasi IFRS tidak berpengaruh terhadap kelengkapan informasi yang wajib diungkapkan oleh perusahaan.

Selain itu, tabel 5 juga memperlihatkan bahwa nilai signifikansi variabel profitabilitas yaitu $0,812 > 0,05$ sehingga H_3 ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Prawinandi, dkk. (2012), Utami, dkk. (2012), Yulianti & Probohudono (2013). Penerapan *good corporate governance* (GCG) di Indonesia menghendaki agar perusahaan-perusahaan menjunjung tinggi pengungkapan dan transparansi dalam laporan keuangan. Perusahaan yang menerapkan GCG akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkapkan informasi secara lengkap kepada investor tanpa

mempedulikan apakah profitabilitas mereka tinggi atau rendah (Prawinandi, dkk., 2012). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi maupun rendah di Indonesia cenderung untuk mengikuti budaya yang menganggap bahwa memberikan pengungkapan dan transparansi merupakan bentuk kepatuhan mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia (Mintara, 2008). Oleh karena itu, profitabilitas terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib.

Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 5 di mana signifikansi variabel *leverage* yaitu $0,210 > 0,05$ sehingga H_4 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Prawinandi, dkk. (2012), Utami, dkk. (2012), Yulianti & Probohudono (2013). Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi cenderung menghindari sorotan *debtholders* dengan mengurangi informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan (Suhardjanto & Wardhani, 2010; Utami, dkk., 2012). Hal yang sama juga terjadi pada perusahaan dengan tingkat *leverage* rendah. Sebagian besar institusi keuangan tidak mengandalkan laporan keuangan untuk membuat keputusan pemberian utang kepada perusahaan. Institusi keuangan lebih mengandalkan pada informasi yang dapat diakses secara langsung dari perusahaan untuk membuat keputusan pemberian kredit (Al-Mutawaa & Hewaidy, 2010; Utami, dkk., 2012). Hal ini mengakibatkan perusahaan dengan tingkat *leverage* rendah tidak terdorong untuk memberikan pengungkapan wajib yang lebih lengkap pada laporan keuangannya. Oleh karena itu, tingkat *leverage* perusahaan tidak mempengaruhi

pengungkapan wajib yang disampaikan perusahaan.

Variabel terakhir dalam penelitian ini adalah pertumbuhan perusahaan dimana pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib. Hal ini dibuktikan dari Tabel 5 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pertumbuhan perusahaan yaitu $0,247 > 0,05$ sehingga H_5 ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Bova dan Pereira (2012). Perusahaan yang pertumbuhannya baik maupun buruk cenderung akan mengungkapkan informasi lengkap karena hal tersebut akan memudahkan mereka untuk mendapatkan modal sendiri dan mengurangi biaya pendanaan eksternal. Biaya pendanaan eksternal yang tinggi akan membebani perusahaan sehingga perusahaan cenderung untuk memberikan pengungkapan yang lebih luas kepada investor.

Keseluruhan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ternyata tidak didukung. Hal ini lebih disebabkan oleh masa transisi yang dihadapi perusahaan manufaktur di Indonesia dari penerapan PSAK berbasis US GAAP menjadi PSAK berbasis IFRS. IFRS mensyaratkan perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif jika dibandingkan dengan US GAAP. Pada penilaian aset tetap, IFRS menghendaki perusahaan agar menerapkan *fair value* karena *fair value* lebih mencerminkan nilai aset tetap yang sebenarnya pada tanggal pelaporan keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya yang kompeten untuk menentukan *fair value* dan hal ini bukan hal mudah untuk dilakukan

perusahaan (Cahyati, 2011). Perusahaan-perusahaan diperkirakan belum siap untuk melatih sumber dayanya atau menyewa jasa penghitung *fair value* karena penaksiran *fair value* membutuhkan dana yang besar. Selain itu, faktor yang menentukan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk memberikan pengungkapan wajib adalah waktu karena sumber daya yang ada di perusahaan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk memahami IFRS yang bersifat *principle-based* (Silviana, 2014). *Principle-based* memungkinkan perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, akan tetapi *principle-based* membutuhkan pemahaman pertimbangan profesional yang matang. Akuntan perusahaan membutuhkan waktu untuk dapat memahami dan memberikan pertimbangan profesional sehingga dapat memberikan pengungkapan yang memadai atas aset tetap yang dimiliki perusahaan (Silviana, 2014). Karena IFRS bersifat *principle-based*, IFRS tidak memberikan panduan khusus yang dapat digunakan perusahaan untuk memberikan pertimbangan profesional sehingga hal ini menyulitkan akuntan dalam memberikan pertimbangan profesional. Dalam kondisi seperti ini, berdasarkan teori *Mimetic Isomorphism*, perusahaan bisa meniru perusahaan lain yang memiliki tingkat pengungkapan terbaik (Dimaggio & Powel, 1983 dalam Setianto, 2014). Akan tetapi, karena tahun 2012 adalah tahun pertama penerapan PSAK 16 dan PSAK 30 berbasis IFRS, hal tersebut juga sulit dilakukan. Atas dasar berbagai teori dan pendapat di atas, sangat dimungkinkan dalam penelitian ini bahwa perusahaan besar maupun kecil,

perusahaan dewasa maupun muda, perusahaan dengan profit dan leverage tinggi maupun rendah, dan perusahaan dengan pertumbuhan baik maupun buruk sama-sama masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan IFRS sehingga keseluruhan hipotesis penelitian ditolak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini memberikan dua kesimpulan. Pertama, rata-rata tingkat pengungkapan wajib IFRS oleh perusahaan manufaktur di tahun pertama pelaksanaan adaptasi penuh IFRS sebesar 63%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS di Indonesia masih rendah karena masih belum memenuhi kriteria 100% yang ditetapkan Bapepam-LK. Kedua, variabel independen berupa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan perusahaan secara parsial terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib. Periode penelitian yang hanya satu tahun yaitu tahun 2012 merupakan keterbatasan utama dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat memperpanjang periode penelitian sehingga diperoleh hasil yang lebih aktual mengenai kepatuhan pengungkapan wajib pada masa penerapan IFRS. Penelitian selanjutnya juga dapat meneliti mengenai perbedaan tingkat kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan pengungkapan wajib ketika menerapkan US-GAAP dan IFRS. Jumlah sampel yang terlalu sedikit juga merupakan keterbatasan penelitian ini sehingga penelitian selanjutnya dapat diperluas ke sektor industri yang lain.

Keterbatasan terakhir yaitu penelitian ini hanya menggunakan dua PSAK sebagai proksi dari pengungkapan wajib sehingga belum bisa merepresentasikan seluruh tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan praktik pengungkapan wajib. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat menambah jumlah PSAK sehingga bisa mendekati angka kepatuhan yang lebih realistis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adina, P. & Ion, P. (2008). "Aspect Regarding Corporate Mandatory and Voluntary Disclosure" *Annals of the University of Oradea: Economic Science*, 3 (1), 1407-1411.
- Ahmed, K. & Curtis, J.K. (1999). "Associations between Corporate Characteristics and Disclosure Levels in Annual Reports: A Meta-Analysis" *British Accounting Review*, 31 (1), 35-61.
- Ahmed, K. & Nicholls, D. (1994). "The Impact of Non-Financial Characteristics on Mandatory Disclosure Compliance in Developing Countries: The Case of Bangladesh" *International Journal of Accounting*, 19 (3), 62-77.
- Akhtaruddin, M. (2005). "Corporate Mandatory Disclosure Practices in Bangladesh" *The International Journal of Accounting*, 40, 399-422.
- Alanezi, F.S. & Albuloushi, S.S. (2010). "Does the Existence of Voluntary Audit Committees Really Affect IFRS-Required Disclosure? The Kuwait Evidence" *International Journal of Disclosure and Governance*, 8 (2), 148-173.
- Ali, M., dkk. (2004). "Disclosure Compliance with National Accounting Standard by Listed Companies in South Asia" *Accounting and Business Research*, 34 (3), 183-199.
- Aljafiri, K. (2008). "Annual Report Disclosure in a Developing Country: The Case of the UAE" *Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting*, 24, 93-100.
- Al-Mutawaa, A. & Hewaidy, A.M. (2010). "Disclosure Level and Compliance with IFRS: An Empirical Investigation of Kuwaiti companies" *The International Business and Economics Research Journal*, 9 (5).
- Arcay, M.R.B. & Vazquez, M.F.M. (2005). "Corporate Characteristics, Governance Rules and the Extent of Voluntary Disclosure in Spain" *Advances in Accounting*, 21, 299-331.
- Arifin, J. (2004). *Analisis Laporan Keuangan Berbasis Komputer*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ball, R. & Foster, G. (1982). "Corporate Financial Reporting: A Methodological Review of Empirical Research" *Journal of Accounting Research*, 20 (Suppl), 161-234.
- Barako, D., dkk. (2006). "Factors Influencing Voluntary Corporate Disclosure by Kenyan Companies" *Corporate Governance: An International Review*, 14 (2), 107-125.
- Benjamin, T.Y., dkk. (1990). "Non Compliance with Disclosure Requirements in Financial Statement: The Case of Hongkong Companies" *The International Journal of Accounting*, 25, 99-112.
- Bova, F. & Pereira, R. (2012). "The Determinants and Consequences of Heterogeneous IFRS Compliance Levels Following Mandatory IFRS Adoption: Evidence from a Developing Country" *Journal of International Accounting Research*, 11 (1), 83-111.
- Cahyati, A.D. (2011). "Peluang Manajemen Laba Pasca Konvergensi IFRS: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Empiris" *Jurnal Riset*

- Akuntansi dan Komputerasi Akuntansi*, 2 (1), 1-7.
- Chau, G.K. & Gray, S.J. (2010). "Family Ownership, Board Independence, and Voluntary Disclosure: Evidence from Hong Kong" *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation*, 19, 93-109.
- Choi, F. (2005). *International Accounting*. New Jersey: Prentice Hall.
- Cooke, T.E. (1989). "Disclosure in the Corporate Annual Report of Swedish Companies" *Accounting and Business Research*, 19 (74), 113-124.
- Darrough, M.N. (1993). "Disclosure Policy and Competition: Cournot vs Bertrand". *The Accounting Review*, 68 (3), 534-561.
- Depoers, F. (2000). "A Cost-Benefit Study of Voluntary Disclosure: Some Empirical Evidence from French Listed Companies" *The European Accounting Review*, 9 (2), 245-263.
- Easley, D. & O'hara, M. (2004). "Information and the Cost of Capital" *Journal of Finance*, 59, 1553-1583.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Glaum, M. & Street, D.L. (2003). "Compliance with the Disclosure Requirements of Germany's New Market: IAS versus US GAAP" *Journal of International Financial Management and Accounting* 14(1): 64-100.
- Haniffa, R. & Cooke, T. (2002). "Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporations" *Abacus*, 38 (3), 317-349.
- Healy, P.M. & Palepu, K.G. (2001). "Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Market: A Review of the Empirical Disclosure Literature" *Journal of Accounting and Economics*, 31, 405-440.
- Healy, P.M., dkk. (2001). "Stock Performance and Intermediation Change Surrounding Sustained Increases in Disclosure" *Contemporary Accounting Research*, Fall, 485-520.
- Inchausti, B.G. (1997). "The Influence of Company Characteristics and Accounting Regulations on Information Disclosed by Spanish Firms" *The European Accounting Review*, 1 (1), 45-68.
- Jensen, M. & Meckling, W. (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure" *Journal of Financial Economics*, 3 (3), 305-360.
- Karim, A.K.M.W. & Ahmed, J.U. (2005). "Determinants of IAS Disclosure Compliance in Emerging Economics: Evidence from Exchange-Listed Companies in Bangladesh". *Working Paper*, Wellington: Victoria University of Wellington.
- Latridis, G. (2008). "Accounting Disclosure and Firms' Financial Attributes: Evidence from the UK Stock Market" *International Review of Analysis*, 17, 219-241.
- Malone, D., dkk. (1993). "An Empirical Investigation of the Extent of Corporate Financial Disclosure in the Oil and Gas Industry" *Journal of Accounting, Auditing, and Finance*, 8 (3), 249-273.
- Marston, C.L. & Shrivs, P.J. (1991). "The Use of Disclosure Indices in Accounting Research: A Review Article" *British Accounting Review*, 23 (23), 195-210.
- McKinnon, J.L. & Dalimunthe, L. (1993). "Voluntary Disclosure of Segmen Information by Australian Diversified Companies" *Accounting and Finance*, 33 (1), 33-50.
- Meek, G.K., dkk. (1995). "Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures by US, UK, and Continental European

- Multinational Corporation" *Journal of International Business Studies*, 26 (3), 555-572.
- Mintara, Y.H. (2008). "Pengaruh Implementasi Corporate Governance terhadap Pengungkapan Informasi". *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Naser, K. (1998). "Comprehensiveness of Disclosure of Non-Financial Companies Listed on the Amman Financial Market" *International Journal of Commerce and Management*, 8 (1), 88-119.
- Omar, B. & Simon, J. (2011). "Corporate Aggregate Disclosure Practice in Jordan." *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*, 27, 166-186.
- Owusu-Ansah, S. (1998). "The Impact of Corporate Attributes on the Extent of Mandatory Disclosure and Reporting by Listing Companies in Zimbabwe" *International Journal of Accounting*, 33 (5), 605-631.
- Owusu-Ansah, S. & Yeoh, J. (2005). "The Effect of Legislation on Corporate Disclosure Practices" *Abacus*, 41 (1), 92-109.
- Popova, T. (2013). "Mandatory Disclosure and Its Impact on the Company Value" *International Business Research*, 6 (5), 1-16.
- Prawinandi, W., dkk. (2012). *Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS*. Diakses dari <http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/067-CG-21.pdf> pada tanggal 25 April 2016.
- Rusiti, Ch., & Kurniawan, Y.A. (2013). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela pada Laporan Tahunan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi XVI*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Suhardjanto, D. & Wardhani, M. (2010). "Praktik Intellectual Capital Disclosure Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia" *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 14 (1), 71-85
- Silviana, Y.H.K. (2014). "Perbedaan Tingkat Pengungkapan antara Perusahaan Asing dan Domestik dengan Adanya Konvergensi IFRS". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Atmadjaya.
- Setianto, A. (2014). "Penerapan IFRS dan Hubungannya dengan Komparabilitas Pengungkapan Aset Tetap pada Laporan Keuangan Perusahaan". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Utami, W.D., dkk. (2012). *Investigasi dalam Konvergensi IFRS di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib dan Kaitannya dengan Mekanisme Corporate Governance*. Diakses dari <http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/066-CG-20.pdf> pada tanggal 25 April 2016.
- Wallace, R.S.O. (1987). "Disclosure of Accounting Information in Developing Countries: A Case Study of Nigeria". *Unpublished Ph.D Thesis*. UK: University of Exeter.
- Wallace, R.S.O. (1988). "Corporate Financial Reporting in Nigeria" *Accounting and Business Research*, 18 (72), 352-362.
- Wallace, R.S.O. & Naser, K. (1995). "Firm-Specific Determinants of Comprehensiveness of Mandatory Disclosure in the Corporate Annual Reports of Firms on the Stock Exchange of Hongkong" *Journal of Accounting and Public Policy*, 14, 311-368.
- Wallace, R.S.O., dkk. (1994). "The Relationship between the Comprehensiveness of Corporate Annual Reports and Firm Characteristics in Spain"

Accounting and Business Research, 25
(97), 41-53.

Yulianti, I. & Probohudono, A.N. (2013).
"Studi Komparasi praktik IFRS Disclosure

Compliance di Indonesia, Malaysia,
Singapura, dan Australia" *Simposium
Nasional Akuntansi XVI*. Manado:
Universitas Sam Ratulangi.